

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*) adalah teori tentang suatu kondisi dimana para manajemen tidak terfokus oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih berorientasi kepada tujuan organisasi. Sasaran hasil utama mereka yaitu untuk kepentingan suatu instansi/lembaga (Donaldson dan Davis, 1991). Dalam teori ini manager sebagai *steward* akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik selaku *principal*. Nosihana dan Yaya (2016) mengatakan bahwa pemerintah yang menjalankan peran sebagai salah satu pihak yang memiliki pengetahuan tentang informasi yang lebih banyak, sehingga diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Dimana informasi tersebut berupa laporan keuangan yang telah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Dasar psikologi dan sosiologi dalam penelitian ini dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, sehingga *steward* mempunyai perilaku di mana tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai tujuan dan sasaran organisasinya. Disini pemerintah berusaha untuk melakukan pekerjaannya dengan baik demi mencapai sasaran organisasi

yang telah dibuat serta tidak mengutamakan kepentingan pribadi maupun individu. Sebagai *steward*, pemerintah perlu membuat pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya sebagai bentuk akuntabilitas publik salah satunya dengan menerbitkan laporan keuangan.

Apabila dikaitkan dengan pemerintah daerah, maka pemerintah sebagai *steward* sedangkan pelayan dan masyarakat sebagai *principal*. Sehingga teori ini cocok diterapkan pada penelitian akuntansi sektor publik di mana *steward* diposisikan sebagai pemerintah daerah dan *principal* sebagai publik yang sekaligus pengambil keputusan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nosihana dan Yaya (2016) dalam konteks akuntansi sektor publik teori stewardship dipandang lebih relevan untuk digunakan dalam mengungkap tingkat pengungkapan dan good governance. Karena didalam akuntansi sektor publik, pihak-pihak pelaksana tugas merupakan bagian dari pihak yang berhak menerima laporan akan tugas tersebut, sehingga steward dalam melaporkan kinerjanya bukan didasarkan atas tekanan dari agen seperti yang digambarkan dalam teori agensi. Dasar yang dilakukan oleh pemerintah sebagai steward ialah kewajiban sebagai pelaksana sehingga berkeharusan melaporkan hasil dari kinerjanya.

2. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Firdaus

et al., 2015). Selain itu pemerintah daerah juga wajib memperhatikan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Oleh karena itu, laporan yang dipublikasikan disusun berdasarkan standar akuntansi sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Suwanda, 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik kualitatif tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Adha Inapty dan Martiningsih, 2016). Hal itu merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila sesuai LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban

atas laporan keuangan yang dibuat (Setyowati, Isthika, dan Pratiwi, 2016).

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Syarifudin, 2014). Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar akuntansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan dan Yudianto (2018) menyatakan standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, karena dalam standar akuntansi pemerintahan ini dijelaskan bagaimana menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan kualitas informasi keuangan yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, maka diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Weygandt *et al.*, (2005) apabila suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada dalam kendali, tujuan akan tercapai, resiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas dan akuntabel.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, peran audit intern tidak terbatas pada pengawasan keuangan saja tetapi mendapat peran baru untuk melakukan pembinaan/konsultasi disamping melakukan review laporan keuangan pemerintah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

1) Lingkungan pengendalian

Merupakan tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian intern yang dapat menimbulkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya

pengendalian bagi instansi/lembaga. Sehingga keseluruhan anggota harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang menimbulkan perilaku positif, mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat (Bastian, 2011).

2) Penilaian risiko

Merupakan identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan untuk mencapai tujuan, membentuk suatu dasar dalam menentukan pengelolaan risiko (Bastian, 2011).

3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur dalam membantu memastikan arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2011).

4) Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dalam suatu bentuk dan sarana komunikasi sehingga memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian serta tanggung jawabnya. Pimpinan juga berperan penting dalam pembuatan laporan, dengan adanya pengawasan dari atasan akan meningkatkan kualitas laporan.

5) Pemantauan pengendalian intern

Proses pemantauan digunakan untuk menilai kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review dapat ditindaklanjuti (Bastian, 2011).

5. Sumber Daya Manusia

Kompetensi menurut Spencer and Spencer, (1993:3) dalam Syarifudin (2014) “*an underlying characteristic’s of an individual which is causally related to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situation*”. Artinya, suatu karakteristik yang mendasari kepribadian seseorang yang menyebabkan saling berkaitan dengan kriteria-keperilakuan efektif atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Harvesi G Alan, 2005). Sumber daya manusia menurut Anggriawan dan Yudianto (2018) adalah pilar utama suatu organisasi dibandingkan dengan unsur-unsur lain seperti modal, teknologi, dan uang karena manusia sendiri mengendalikan orang lain.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali hubungan antara

kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat pemerintah dengan kualitas laporan keuangan. Karena keberadaan sumber daya manusia sangat berperan dalam penyusunan laporan keuangan. Jika sumber daya manusia yang terkandung dalam pemerintah kompeten di bidangnya dan mampu melakukan tugasnya dengan baik, itu akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Sumber daya manusia yang berkompeten akan memberikan manfaat terhadap pembuatan laporan keuangan, salah satunya adalah dapat menghemat waktu dan tenaga. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki sumber daya manusia memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

6. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*) *electronic commerce*, dan yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akuntabel.

Thompson *et al.*, (1991) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data yang di

dapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi. Manfaat dari penerapan teknologi informasi antara lain:

a) Kecepatan (*Speed*)

Komputer dapat mengerjakan suatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik, jauh lebih cepat dari yang dikerjakan oleh manusia.

b) Konsistensi (*Consistency*)

Hasil pengolahan lebih konsisten karena formatnya sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit menghasilkan yang sama persis.

c) Ketepatan (*Precision*)

Komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat. Komputer juga dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit.

d) Keandalan (*Reliability*)

Apapun yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan yang dilakukan oleh manusia. Kemungkinan kesalahan lebih kecil jika menggunakan komputer.

7. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, penerimaan nilai dan tujuan

organisasi (Luthans, 2006). Sedangkan Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen merupakan loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya (Mowday *et al.*, 1979).

Menurut Robbins dan Judge (2007), indikator komitmen organisasi yaitu sebagai berikut:

- a) Komponen afektif (*affective commitment*), perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.
- b) Komponen normatif (*normative commitment*), komitmen untuk bertahan dengan organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis.
- c) Komponen berkelanjutan (*continuance commitment*), nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dengan sebuah organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan adanya standar akuntansi pemerintah, diharapkan semua elemen pemerintah wajib menerapkan dan mempraktekkan standar akuntansi pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka membentuk tata pemerintahan yang baik (*Good*

Governance). Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.*, (2018) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selain penelitian tersebut, penelitian Karsana dan Suaryana (2017) juga menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan, maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik hipotesis:

H₁: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi merupakan modal seseorang atau organisasi dalam merealisasi apa yang menjadi tujuannya atau tujuan organisasi. Sehingga sumber daya manusia yang berkompeten akan memberikan manfaat terhadap pembuatan laporan keuangan, salah satunya yaitu dapat menghemat waktu dan tenaga. Penelitian yang dilakukan Yeny (2016) menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syarifudin (2014) juga

menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan. Hal itu disebabkan kompetensi SDM di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang belum mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, bahkan tidak ada sama sekali pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi, sedangkan dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Akan tetapi, dalam penelitian Karsana dan Suaryana (2017) dan Harlinda (2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kemampuan sumber daya manusia yang berkompeten terhadap pengelolaan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan daerah. Karena kompetensi sumber daya manusia yang memadai akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang digunakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, serta ketaatannya terhadap perundang-undangan dalam penyajian laporan keuangan. Kelemahan pada sistem pengendalian intern pemerintah dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dan penyimpanan dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian Nurillah dan Muid (2014) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian lain yang dilakukan Yeny (2016) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Silviana dan Zahara (2015) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Harlinda (2017) menyatakan pengendalian intern akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian digunakan untuk memastikan sebuah organisasi mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan informasi yang tersedia dan membandingkan hasil laporan keuangan dengan entitas lain. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah daerah yang terus berupaya mencapai kinerja yang tinggi dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian diharapkan tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah dapat tercapai.

Penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwanda (2015) yang menyatakan hasil secara parsial pada variabel Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak berpengaruh

signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan belum tercapainya perbaikan sistem pengendalian internal, yaitu keandalan pelaporan. Tujuan dari pengendalian internal adalah efektif agar laporan keuangan memenuhi tanggung jawab dalam pelaporan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh perorangan tetapi juga pada organisasi, contohnya organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk mempermudah dan mempercepat dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi wajib bagi setiap aparatur pemerintah daerah supaya menghasilkan laporan keuangan yang disusun baik dan benar, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dijadikan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah dan Muid, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Suwanda (2015) menyatakan bahwa hasil secara parsial pada variabel penggunaan teknologi informasi tidak mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini tidak akan terpengaruh dari penggunaan teknologi informasi karena teknologi atau

informasi yang belum digunakan secara optimal tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Implementasi teknologi informasi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan mahal. Selain itu, banyak sumber daya manusia yang pemerintah daerah yang tidak menguasai teknologi informasi.

Penelitian yang dilakukan Yeny (2016) menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan Firdaus *et al.*, (2015) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi

Penerapan standar akuntansi pemerintah akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas disusun dan disajikan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Cornelia *et al.*, (2016) menyatakan bahwa efektivitas penerapan

standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwanda (2015) secara parsial pada variabel SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa jika aplikasi SAP dilaksanakan oleh pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan menjadi baik.

Aparatur pemerintah yang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi maka akan memiliki tanggung jawab dan menunjukkan dukungan kuat dalam mencapai tujuan organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dan diperkuat oleh komitmen organisasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi

Sumber daya manusia yang berkompeten merupakan penunjang terlaksananya laporan keuangan yang berkualitas (Siwambudi *et al.*, 2017). Pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya akan berusaha meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan kemampuan yang

dimilikinya untuk menghasilkan laporan keuangan yang informatif. Sehingga informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu dan keterlibatan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu (Syaifullah, 2014).

Penelitian yang dilakukan Stefani *et al.*, (2018) menyebutkan bahwa komitmen organisasi secara positif memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas keuangan. Jika sumber daya manusia yang menjalankan sistem akuntansi memiliki kompetensi di bidang akuntansi, maka sumber daya ini akan menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang ditetapkan sehingga mereka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu komitmen dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapitri R (2016) menyatakan komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Komitmen organisasi yang tinggi menghasilkan performa kerja baik, rendahnya tingkat absen dan rendahnya tingkat keluar masuk (*turnover*) karyawan. Sehingga aparatur pemerintah dengan komitmen yang tinggi terhadap organisasinya, maka akan berkinerja lebih baik.

Penelitian yang dilakukan Siwambudi *et al.*, (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun interaksi komitmen organisasi dengan kompetensi sumber daya manusia tetapi tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sehingga peneliti melihat komitmen organisasi memperkuat pengaruh antara kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Peneliti menduga semakin tinggi komitmen organisasi akan memengaruhi kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintahan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dibuat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan:

H₆: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya penyelenggaraan kegiatan di instansi pemerintah dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, serta pengelolaan keuangan dapat dilaporkan secara andal. Untuk itu dalam sebuah instansi perlu adanya sistem pengendalian intern yang baik agar segala kegiatan dapat berjalan sesuai prosedur.

Aparatur pemerintah yang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi maka akan memiliki tanggung jawab dan menunjukkan dukungan kuat dalam mencapai tujuan organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas.

Menurut penelitian yang dilakukan Stefani *et al.*, (2018) komitmen organisasi berpengaruh positif memoderasi sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Pada kenyataannya seorang pegawai yang mempunyai komitmen tinggi terhadap tujuan organisasinya maka tindakan dan kinerjanya akan sesuai dengan pengendalian intern. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Karsana dan Suaryana (2017) bahwa semakin baik pengendalian intern suatu entitas tentu akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dikarenakan segala sesuatunya dapat diawasi sehingga tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan membantu pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat akurasi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Ditambah dengan karyawan yang memiliki komitmen organisasi tinggi dan mementingkan tujuan organisasi, maka akan

menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu dan menciptakan kinerja yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan Suwanda (2015) menyatakan bahwa secara parsial pada variabel komitmen organisasi mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini didukung oleh penelitiannya Stefani *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data secara manual membuat kurang efektif jika dari segi volume dan biaya pemrosesan. Saat menggunakan sistem, meskipun biaya investasi awal lebih besar, tetapi akan dapat mengurangi biaya pemrosesan sambil mempertahankan volume. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kemampuan sistem. Ketika komputer dan komponen yang terkait dengan teknologi informasi terintegrasi ke dalam sistem informasi akuntansi maka dalam hal mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data dilakukan hanya menggunakan sistem.

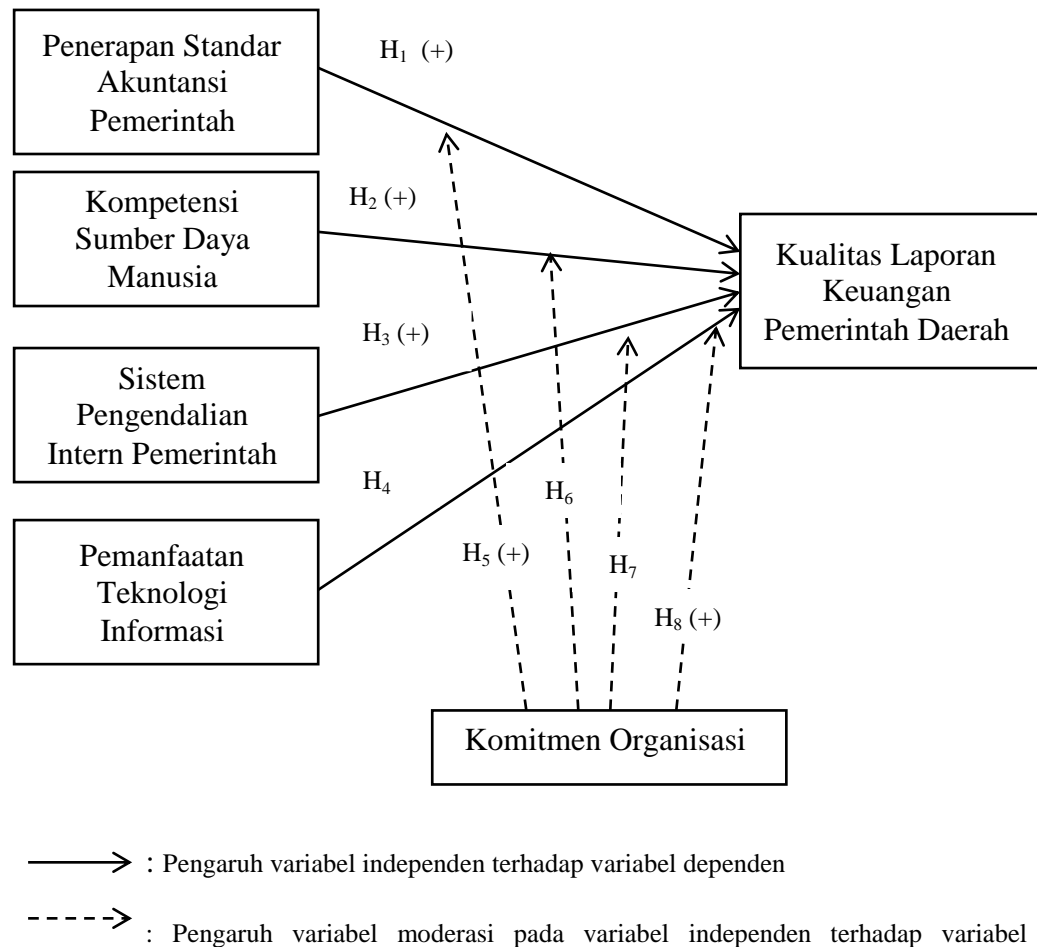
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan ke layanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan

pemerintah untuk bekerja secara terintegrasi. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₈: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

C. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis dibuat paradigma penelitian untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen, sedangkan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Untuk memperjelas pengaruh dari masing-masing variabel tersebut, maka disajikan model penelitian yang tersaji pada Gambar 2.1



GAMBAR 2.1.
Model Penelitian